

KESIAPAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI MUNICIPIO LIQUICA TIMOR-LESTE

Orlando do Carmo Martins

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri

email: pcarmo306@yahoo.com

Paper Accepted: 23 Februari 2017

Paper Reviewed: 1-10 Maret 2017

Paper Revised: 11-30 Maret 2017

Paper Edited: 1-15 April 2017

Paper Approved: 25 April 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi otonomi daerah di *Municipio* Liquica Timor-Leste, serta untuk mengetahui factor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi otonomi daerah di *Municipio* Liquica Timor-Leste. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di *Municipio* Liquica Timor-Leste. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu *Municipio* yang secara demografis berbatasan langsung dengan *Posto Administrativo* (Kecamatan) Atabae *Municipio Bobonaro*. Kesiapan implementasi otonomi daerah dari sisi sumber daya yakni menyangkut sarana dan prasarana yang ada di *Municipio* Liquica ini sudah siap untuk menerima otonomi daerah itu sendiri. Faktor dan upaya yang menghambat pelaksanaan implementasi otonomi daerah di *Municipio* Liquica yaitu: (a) Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan empat bahasa yang ada, di mana tidak semua aparat *Municipio* menguasai empat bahasa tersebut. (b) Terbatasnya anggaran pelaksanaan implementasi otonomi daerah di *Municipio* Liquica. (c) Masih terbatasnya tenaga operasional implementasi otonomi daerah di *Municipio* Liquica.

Kata Kunci : Implementasi Otonomi Daerah, Daerah Perbatasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desentralisasi berarti pengurangan pemusatan administrasi pada suatu pusat tertentu dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah (lokal). Pengertian ini sekaligus menyatakan gagasan desentralisasi sebagai suatu gejala politik yang melibatkan administrasi dan pemerintahan. Desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, apakah hirarki tersebut merupakan tingkatan pemerintahan dalam suatu negara ataukah tingkatan.

Desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (*teritorial*). Desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*)

diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut, desentralisasi mensyaratkan pembagian wilayah negara kedalam daerah-daerah yang lebih kecil serta pembentukan institusi-institusi administratif dan politis di daerah tersebut.

Implementasi otonomi daerah di *Republik Demokratik Timor-Leste* bukanlah hal yang sangat sulit untuk diwujudkan namun bukan berarti hal yang mudah untuk direalisasikan khususnya di *Municipio Liquica* yang membawahi tiga (3) *Posto Administrativo* (Kecamatan), dan *Municipio* yang berbatasan dengan wilayah *Posto Administrativo* (Kecamatan) Atabae *Municipio Bobonaro*.

Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah perspektif implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica Timor-Leste sebagai berikut:

- Sumber daya manusia, aparatur daerah *Município Liquica* masih sangat terbatas.
- Pemerintah Pusat dan daerah atau *Município*, sudah mempersiapkan regulasi untuk mengatur dan mengelola *Município* (Kotamadya).
- Terjadinya tumpang tindih antara fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga yang ada di *Município* (Kotamadya) Liquica sehingga tidak berjalan efektif dan efisien.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini di batasi pada kesiapan implementasi otonomi daerah di *Município Liquica* Timor-Leste. Kesiapan implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah sudut pandang dalam implementasi otonomi daerah.

Perumusan Masalah

- Bagaimana kesiapan implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica Timor-Leste?
- Apa faktor penghambat dalam upaya implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica Timor-leste?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica Timor-Leste, serta faktor dan upaya yang turut mempengaruhi implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica Timor-Leste.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi otonomi daerah di *Município* (Kotamadya) Liquica Timor-Leste.
- Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan upaya yang menghambat Implementasi

otonomi daerah di *Município* (Kotamadya) Liquica Timor-Leste.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam hal Implementasi Otonomi Daerah di *Município* (Kotamadya) Liquica Timor-Leste.

Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa Program Pascasarjana MAPD IPDN khususnya mengenai implementasi otonomi daerah, sekaligus menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian sebagai bekal melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan implementasi otonomi daerah di *Município* (Kotamadya) Liquica Timor-Leste.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Kajian Pustaka Kesiapan

Menurut Soemanto (www.psychologimania.com/2013/05/pengertian_kesiapan) ada yang mengatakan bahwa readiness sebagai kesiapan atau kesediaan orang untuk berbuat sesuatu. *Readiness* sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu”.

Implementasi

Edwards III (1980:2) berpendapat bahwa “implementasi otonomi daerah dapat mencakup sekumpulan tindakan yang luas yaitu menetapkan dan mengimplementasikan instruksi-instruksi menentukan dana pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian mengumpulkan data, menyerahkan informasi,

menganalisa masalah-masalah, mengangkat dan mengkaji, membentuk unit-unit organisasi, menentukan alternatif, merencanakan masa yang akan datang, bermusyawarah dengan masyarakat dengan kelompok-kelompok kepentingan dengan aktivitas bisnis dengan komisi legislatif, unit-unit birokrasi bahkan dengan negara-negara lain”.

Otonomi Daerah

Menurut Livack & Sedom dalam Sadu Wasistiono (2003:2) bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab mengenai fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintahan sub-nasional, badan semi otonomi maupun lembaga non pemerintah. Otonomi daerah pada dasarnya dalam rangka kebijakan desentralisasi untuk menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan di daerah.

Maddick dalam Hoessein (1999:10) menyatakan bahwa desentralisasi mengandung dua elemen, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu. Jadi desentralisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa urusan-urusan pemerintahan yang semula merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Menurut Umar Husein (2004:170) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Edward III dalam Deddy Mulyadi (2015:28-29) menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi.

Peranan penting sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya material lainnya yang

mendukung kesiapan implementasi otonomi daerah tersebut.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana.

Sebagai kegunaan atau kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan jika penerapan kebijakan dilakukan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus mereka kerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kesiapan implementasi otonomi daerah.

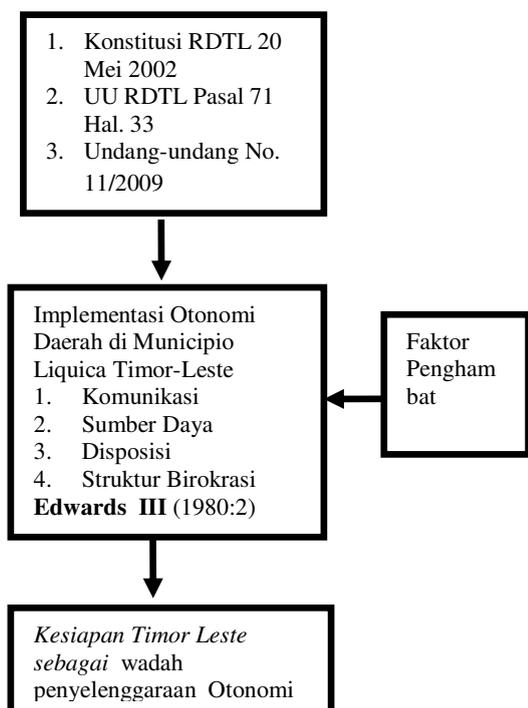
4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggungjawaban di antara berbagai unit organisasi.

Edwards III (1980:2) berpendapat bahwa implementasi otonomi daerah dapat mencakup sekumpulan tindakan yang luas yaitu menetapkan dan mengimplementasikan instruksi-instruksi menentukan dana pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian mengumpulkan data, menyerahkan informasi, menganalisa masalah-masalah, mengangkat dan mengkaji, membentuk unit-unit organisasi, menentukan alternative, merencanakan masa yang akan datang, bermusyawarah dengan masyarakat dengan kelompok-kelompok kepentingan dengan aktivitas bisnis dengan komisi legislatif, unit-unit birokrasi bahkan dengan negara-negara lain.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: George Edwards III (1980:2) diolah oleh peneliti.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Nasution (2002:23) menjelaskan desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat melaksanakan penelitian. Suchman dalam (Nazir, 1999:99) mengatakan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber Data Penelitian

Menurut Lonflad dalam Moleong, (2002:112), bahwa: sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan

memberikan data berupa kata-kata atau tindakan serta mengetahui dan mengerti masalah yang diteliti.

Ridwan (2003:24) berpendapat bahwa sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengambilan data yang dihimpun secara langsung oleh peneliti disebut sumber data primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber data sekunder.

Data Primer

Menurut Rusidi (2003:14) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber data primer. Data primer didapat dari lapangan yang berupa informasi dan hasil wawancara dengan para informan yang dianggap memiliki informasi tentang Implementasi Otonomi Daerah. Informan adalah sumber primer yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya. Lebih lanjut sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut, Amirin (2000:132).

Untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Darimana atau siapa yang pertama di wawancarai tidak menjadi persoalan.

Sedangkan *snow-ball sampling* yang dikenal dengan istilah bola salju, yaitu peneliti memilih informan (dalam Arikunto disebut responden) secara berantai. Jika pengumpulan data dari responden-1 sudah selesai, peneliti minta agar responden tersebut memberikan rekomendasi untuk responden ke-2 dan begitu seterusnya sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai dengan kebutuhan, Arikunto (2003:15).

Lebih lanjut Sugiyono (2005:97) mengatakan bahwa: Snow Ball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang

sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137) data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Hal ini, dikarenakan data sebelumnya telah disajikan oleh orang lain”.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung (melalui media perantara). Diantara data sekunder ini adalah bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam historis (data dokumenter) baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka operasionalisasi konsep guna mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep Penelitian	Dimensi	Indikator
(1)	(2)	(3)
Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah di Municipio Liquica Timor-Leste. (Edwards III)	Komunikasi	1. Transformasi informasi kepada pemerintah daerah 2. Transmisi informasi Kecamatan (Postu Administrativu)
	Sumber Daya	1. Jumlah aparat yang tersedia. 2. Tingkat pengetahuan dan kemampuan aparat terhadap tugas. 3. Kesesuaian sarana dan prasarana yang diperlukan. 4. Penyediaan anggaran sebagaimana yang

		dibutuhkan
	Disposisi	1. Responsivitas terhadap perspektif implementasi otonomi daerah. 2. Tingkat fleksibilitas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan implementasi otonomi daerah

(1)	(2)	(3)
	Struktur Birokrasi	1. Struktur Organisasi 2. Koordinasi antar instansi yang terlibat. 3. Kepemimpinan

Sumber: George Edwards III, (1980:2)

Informan dan Cara Menentukannya

Informan adalah pihak yang dapat memberikan informan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Rusidi (2003:14), “informan adalah sumber data primer yang mampu memberikan informasi mengenai diri atau keadaan orang lain, atau memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya”.

Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Administrador (Bupati) Municipio* (Kotamadya)
2. Ketua Komisi Persiapan Otonomi Daerah
3. Wakil Bupati
4. *Administrador do Posto* (Camat)
5. Tokoh Adat
6. Chefe Suco (Kepala Desa)
7. Masyarakat

Snowball sampling menurut Sugiyono (2014:85) adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.

Dalam penelitian sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data akan peneliti lakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di *Município* Liquica Timor-Leste, lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu *Município* yang secara Demografis berbatasan langsung dengan *Posto Administrativo* (Kecamatan) Atabae *Município* Bobonaro.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Município (Kotamadya) Liquica merupakan salah satu bagian dari Negara Republik Demokratik de Timor-Leste (RDTL). *Município* Liquica terdiri dari tiga (3) *Posto Administrativo* (Kecamatan), satu (1) *Posto Administrativo* (Kecamatan) yakni Maubara berada dekat pada pesisir pantai, satu (1) *Posto Administrativo* (Kecamatan) lagi berada dalam jantung *Município* Liquica, dan satu (1) *Posto Administrativo* (Kecamatan) lagi yakni Bazartete berada pada dataran pegunungan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Demokratik de Timor-Leste. *Município* (Kotamadya) Liquica dibentuk berdasarkan pada pasal 5 ayat 1-3 tentang Desentralisasi, dalam hal penataan daerah, Negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum. Undang-undang akan menentukan dan menetapkan ciri-ciri dari masing-masing tingkat daerah, serta wewenang badan pemerintahan masing-masing. Sedang pulau *Oecusi* dan *Autauro* akan mendapatkan perlakuan khusus secara *administrative* dan ekonomi.

Hasil Pembahasan

Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica dari sisi Komunikasi.

Untuk mengetahui kesiapan implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica, tentang komunikasi yang dibangun antara pemerintah *Município* dengan masyarakat kecamatan dan desa, maka diperoleh informasi melalui wawancara dengan Bapak *Administrador*

Município (Kotamadya) Liquica (Bupati Kabupaten Liquica), yang mengatakan bahwa: “Ya menurut kami dalam menjalankan otonomi daerah sangat perlu mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti apa itu otonomi daerah karena dalam menjalankan otonomi daerah pasti ada dampak positif dan negatifnya jadi kita harus bekerja lebih serius lagi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Tanpa kerja keras tersebut kita akan kesulitan mensejahterakan masyarakat karena roda pemerintahan daerah dijalankan dengan adanya kerja keras dari pemerintah *Município* (Kotamadya). Karena itu perlu adanya pengembangan di bidang atau sektor yang sangat mendukung pemerintahan daerah seperti sektor pertanian, pendidikan, perindustrian, perikanan dan pemerintah”.

Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica dari sisi Sumber Daya Manusia.

Untuk mengetahui perspektif implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica, dari sisi sumber daya, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan ketua *Komisi O Conselho para a descentralizacao* (Ketua Komisi Persiapan Otonomi Daerah), mengatakan bahwa: “Menurut saya, dilihat dari segi kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini belum mendukung Perspektif Implementasi Otonomi Daerah karena masih kurang tenaga kerja, sebab setiap kepala bagian yang ada hanya satu atau dua orang saja, maka harus ditambah tenaga kerja dan rekrut tenaga kerja agar bisa membagi pekerjaan. Setiap kepala bagian dan juga harus mendukung dengan Training yang cukup agar meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan Training yang khusus agar bisa meningkatkan sumber daya manusia yang memadai”.

Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah dilihat dari sisi Disposisi

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait dengan implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica. Peneliti melakukan wawancara dengan informan Ketua Komisi Persiapan Otonomi Daerah, mengatakan bahwa:

1. Mempersiapkan dasar hukum implementasi otonomi daerah;
2. Melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala kesemua teritori di Timor-Leste,

- yang menjadi sasaran kami adalah masyarakat, kepala desa dan rukung keluarga;
3. Melakukan studi banding termasuk ke Indonesia yang sudah terlebih dahulu menerapkan otonomi daerah;
 4. Mempersiapkan semua sarana dan prasarana pendukung dari tingkat pusat sampai ke *Município*;
 5. Menggunakan Media yang ada termasuk *TVTL* (Televisi Timor-Leste) untuk membantu menginformasikan semua kegiatan yang dilakukan.

Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah Dilihat Dari Sisi Struktur Birokrasi.

Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam program implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica yang bekerja sama dengan aparat daerah dengan pemerintah pusat, untuk mewujudkan impian masyarakat selama ini, sesuai dengan target yang diharapkan.

Untuk mengetahui hubungan kerja sama antara pemerintahan Kecamatan dan Desa dengan Pemerintahan *Município* dalam kesiapan implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica, peneliti melakukan wawancara dengan Official Logistik *Município* Liquica, mengatakan bahwa:

1. Perlu terciptanya harmonisasi kerja sama antara perangkat pemerintah *Município*, *Posto Administrativo* (Kecamatan) dan *Suco* (Desa), artinya dengan diterimanya otonomi daerah oleh masyarakat setempat maka perjuangan rakyat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di daerah tersebut harus diperjuangkan semaksimal mungkin;
2. Implementasi Otonomi Daerah di pemerintah suatu *Município* haruslah nyata dan bertanggungjawab, artinya otonomi daerah harus mengenai sasaran guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa-desa, kecamatan-kecamatan di suatu wilayah atau daerah;
3. Tujuan lain implementasi otonomi daerah di *Município* adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan paling bawah yaitu desa, kemudian kecamatan dan *Município*, terutama dalam pelayanan terhadap politik, kesehatan, pendidikan dan selanjutnya akan menciptakan masyarakat yang adil dan

makmur. Kemakmuran suatu daerah akan terlihat dari gaya hidup masyarakat di tempat tersebut yang semakin hari semakin meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan selama melakukan penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica Timor-Leste sudah cukup baik dan memadai, yaitu:

- a. Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica sudah pada tahapan selesai sosialisasi dan perumusan format otonomi daerah, yang diharapkan untuk diimplementasikan nantinya bisa menjawab semua masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di *Município*.
- b. Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah dari sisi Sumber Daya yakni menyangkut sarana dan prasarana yang ada di *Município* Liquica ini sudah siap untuk menerima Otonomi daerah itu sendiri.
- c. Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah dari sisi disposisi sudah cukup baik yaitu:
 - 1) Mempersiapkan dasar hukum tentang implementasi otonomi daerah;
 - 2) Melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala ke semua teritori *Município* (Kotamadya) Liquica.
 - 3) Melakukan studi banding termasuk ke Indonesia yang sudah terlebih dahulu menerapkan otonomi daerah;
 - 4) Mempersiapkan semua sarana dan prasarana pendukung di *Município*;
 - 5) Menggunakan media yang ada termasuk *TVTL* (Televisi Timor-Leste) untuk membantu menginformasikan semua kegiatan yang dilakukan.

Faktor Penghambat dalam Upaya Implementasi Otonomi Daerah di *Município* Liquica Timor-Leste.

Faktor dan upaya yang menghambat pelaksanaan implementasi otonomi daerah di *Município* Liquica yaitu:

- a) Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan empat bahasa yang ada, dimana tidak semua aparat *Município* menguasai empat bahasa tersebut.

- b) Terbatasnya Anggaran pelaksanaan implementasi Otonomi Daerah di *Município Liquica*.
- c) Masih terbatasnya tenaga operasional implementasi otonomi daerah di *Município Liquica*.

Saran

Dari uraian kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua pihak, baik Pemerintah, Komisi Persiapan Otonomi Daerah, masyarakat, kepala desa, dan RK (Rukung Keluarga) harus terlibat dalam menjalankan dan melaksanakan implementasi otonomi daerah di *Município Liquica* Timor-Leste.
- b. Perlunya menambahkan anggaran guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di *Município* dalam rangka menghadapi Implementasi Otonomi Daerah kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. (1980). *Understanding Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: Algaprint
- Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Dedy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasir. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexi, J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdak.
- Rusidi. (2003). *Bahan Ajar Pada Program Pascasarjana Administrasi Pemerintah Pemerintahan Daerah IPDN*. Jakarta: Jatinangor Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.